



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE

NOMOR : 021/03022009
HARI : SELASA
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2009

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	INTERNASIONAL	
1.	EPG Indonesia-Malaysia Fokuskan Masalah TKI	3
2.	Presiden SBY Akan Buka Dialog Kesejarahan RI-Malaysia	3
3.	Hillary Segera Melawat ke Asia	3
4.	Perekonomian: Pertumbuhan Perdagangan Dunia Anjlok	4
5.	Indonesian navy rescues boat people from Myanmar	5
6.	Australia Bebaskan Sebuah Kapal Ikan Indonesia	5
7.	RI Ratifikasi Konvensi Stockholm: Masih Perlu Dukungan Fraksi-fraksi di DPR	
8.	Bank Dunia-Jepang Bentuk Lembaga Keuangan Baru	6
II.	NASIONAL	
A.	POLITIK	
1.	PEMBERANTASAN KORUPSI: Gebrakan KPK Dinilai Menurun	7
2.	Isu ABS, SBY Seret TNI/Polri ke Ranah Politik	8
B.	EKONOMI	
1.	Ekspor Nonmigas 2008 Lampau Target	8
2.	Indonesia Peroleh Komitmen Pinjaman Hingga US\$ Miliar	9
3.	CADANGAN DEvisa Kuartal IV, Dana Parkir Masuk Indonesia	10
4.	Government to maintain fuel prices during 2009	10

	C.	SOSBUD	
	1.	Duta Besar Jepang Saksikan "Pintu Terlarang"	11
	2.	Alanda Duta Indonesia di Forum Pembuat Perubahan	12
	3.	2008,Wisman Capai 6,4 Juta Orang	13
	D.	HANKAM	
	1.	Pulau Nipah Batas Laut Indonesia-Singapura	14
	2.	ALUTSISTA: Tiga Sukhoi Resmi Diserahkan kePemerintah Indonesia	14
	E.	HUKUM	
	1.	LEGISLASI: RUU Rahasia Negara Ingin Ditunda	15
	F.	OLAHRAGA	--
	G.	LINGKUNGAN HIDUP	
	1.	Kebijakan Sektor Kehutanan yang Menzalimi Rakyat Indonesia	15
III.	ARTIKEL		
	1.	JICA Bantu Lestarkan Mangrove Pulau Kembang	16
IV.	LAIN-LAIN		
	1.	PERTAHANAN: Indonesia Harus Waspada Ancaman Nonmiliter	17
V.	EDITORIAL		
	1.	Pengerah TKI Bersaing dengan Pihak Asing	19
	2.	Antara Forum Belem dan Davos	20
	3.	Gangguan Perbatasan Terulang Lagi	21

Jakarta, 3 Februari 2009
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media

I. INTERNASIONAL

:

1. EPG Indonesia-Malaysia Fokuskan Masalah TKI

Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia akan menjadi fokus utama dalam rekomendasi Eminent Person Group (EPG) Indonesia-Malaysia.

"Hubungan Indonesia-Malaysia ini unik karena konsentrasi TKI terbesar adalah di Malaysia dan kita sadari ada sensitivitas di Indonesia-Malaysia mengenai masalah ini. TKI ini menyangkut kepentingan dua belah pihak," ujar juru bicara kepresidenan Dino Patti Djalal di kantor presiden, Jakarta, Senin (2/2).

Disadari, lanjut Dino, masalah-masalah politik yang timbul sering berkaitan dengan TKI. Karenanya, dalam rekomendasi ini terdapat cara bagaimana penanganan masalah TKI yang lebih efektif di lapangan. "Hasil rekomendasi itu, akan diserahkan ke kedua kepala negara," kata Dino.

Selain masalah TKI, tim EPG akan melakukan diskusi kesejarahan membahas latar belakang sejarah dan budaya Indonesia-Malaysia. "Membahas salah satu hal yg mulai dilupakan generasi muda yaitu hubungan Indonesia-Malaysia yang memiliki latar belakang sejarah dan budaya Indonesia-Malaysia akan ada diskusi kesejarahan dan diharapkan dilakukan bersamaan dengan dilakukan hubungan bilateral kedua negara," tukasnya. (Media Indonesia)

2. Presiden SBY Akan Buka Dialog Kesejarahan RI-Malaysia

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono akan membuka "Dialog Kesejarahan Indonesia-Malaysia" pada Maret 2009, kata juru bicara Kelompok Pakar Indonesia Musni Umar di Jakarta, Senin (2/2), se usai bertemu dengan Presiden Yudhoyono.

"Presiden menegaskan akan membuka dialog bertema Membangkitkan Memori Kolektif antar Bangsa. Rencananya akan dilaksanakan pertengahan Maret 2009 di Jakarta," katanya. Selain mengatakan akan membuka dialog kesejarahan, kata Musni, Presiden juga menyampaikan bahwa hasil kerja Kelompok Pakar (Eminent Persons Group/EPG) akan menjadi rujukan dalam membangun hubungan Indonesia-Malaysia terutama yang berkaitan dengan hubungan antar individu atau "people to people", karena dibahas dan dikemukakan oleh para tokoh independen.

"Presiden menerima baik rekomendasi EPG dan meminta Menlu untuk mengundang para Menteri terkait dengan rekomendasi EPG," ujarnya.

Dalam pertemuan itu Presiden Yudhoyono didampingi Menlu Hassan Wirayuda, Mensesneg Hatta Rajasa, dan Seskab Sudi Silalahi.

Sedangkan EPG Indonesia terdiri dari Ketua EPG Indonesia Try Sutrisno dan anggota Quraish Shihab, Des Alwi, Musni Umar, Pudentia, dan Wahyuni Bahar.

EPG Indonesia dan Malaysia yang masing-masing beranggotakan tujuh pakar (Indonesia beranggotakan enam orang pascameninggalnya Ali Alatas) dibentuk pada pertengahan 2008 untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua negara dan meningkatkan hubungan baik di masyarakat.

Selama beberapa waktu terakhir hubungan masyarakat kedua negara sempat mengalami beberapa gangguan akibat beberapa insiden, antara lain pemukulan wasit Indonesia oleh aparat Malaysia, insiden salah tangkap istri atase pendidikan Indonesia dan klaim sejumlah kesenian tradisional asal Indonesia oleh Malaysia.

Insiden-insiden tersebut sempat menimbulkan aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia. (Jurnal Nasional)

3. Hillary Segera Melawat ke Asia

Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton bulan ini akan melakukan lawatan Asia pertama sejak menjabat.

Menurut kementerian luar negeri Korea Selatan (Korsel), Hillary akan mengunjungi China, Jepang, dan Korsel. Rencana lawatan Hillary itu sedang dikonsultasikan antara Korsel dan AS. Kendati tanggal pasti kedatangan Hillary belum dipastikan, laporan media menunjukkan bahwa kunjungan Menlu AS itu pada pertengahan Februari.

Sejumlah pakar di Amerika telah menyarankan Hillary untuk mengunjungi Asia segera setelah dilantik sebagai menlu demi menunjukkan bahwa pemerintahan baru AS menyeimbangkan pendekatan antara Asia dan Eropa.

Kunjungan Hillary tersebut dilakukan pada saat yang sulit karena negosiasi pelucutan nuklir Korea Utara (Korut) saat ini mengalami kebuntuan. Perundingan denuklirisasi tersebut melibatkan AS dan empat negara berpengaruh di Asia, termasuk Korsel.

Korut bahkan meningkatkan ancaman militernya terhadap pemerintah konservatif Korsel. Pada Jumat (30/1), Korut menghapus seluruh kesepakatan yang pernah dibuat bersama Korsel. Aksi Pyongyang tersebut semakin meningkatkan ketegangan militer dan meningkatkan kemungkinan konflik militer.

AS saat ini tampaknya sedang mengkaji ulang kebijakannya dengan Korut. Pekan lalu, Hillary menyatakan tetap mendorong perundingan enam pihak untuk pelucutan nuklir Pyongyang. Selain itu, Hillary juga menunjukkan kemungkinan pembicaraan bilateral antara AS dan Korut.

Di Jepang, media mengutip sumber tanpa nama bahwa Hillary telah sepakat menjadikan Jepang sebagai tujuan pertama dalam lawatan Asia. Jika benar, langkah tersebut akan menyenangkan Tokyo yang saat ini sedang diliputi keraguan tentang posisi Jepang sebagai aliansi utama AS di Asia.

Sejumlah pemimpin Jepang memiliki memori pahit dengan suami Hillary, mantan Presiden AS Bill Clinton yang terus menekan Tokyo terkait masalah perdagangan. Bill Clinton juga hanya terbang melintasi Jepang dalam kunjungan ke China pada 1998. "Jepang berharap Hillary akan terlibat dalam konferensi mendatang di Tokyo untuk meningkatkan bantuan ke Pakistan," ujar pejabat Pemerintah Jepang.

Pemerintahan Presiden AS Barack Obama telah berjanji untuk fokus memerangi teror di Pakistan dan Afghanistan. Dalam percakapan telepon dengan Menlu Jepang Hirofumi Nakasone, Hillary menegaskan sangat memperhatikan masalah penculikan warga sipil Jepang oleh Korut pada 1970-an dan 1980-an untuk melatih mata-mata.

Jepang memiliki hubungan hangat dengan pemerintahan eks Presiden AS George W Bush. Namun Tokyo menentang keputusan Bush terkait kesepakatan denuklirisasi untuk menghapus Korut dari daftar hitam negara-negara pendukung terorisme. (Media Indonesia)

4. Perekonomian: Pertumbuhan Perdagangan Dunia Anjlok

Krisis global telah pula menyebabkan perdagangan global menurun atau hanya mencapai 4 persen tahun lalu. Khususnya pada November, terjadi penurunan transaksi perdagangan global paling dalam. Demikian laporan dari Organisasi Perdagangan Dunia yang dikeluarkan di Geneva, Swiss, Senin (2/2).

Dampak penurunan perdagangan itu juga akan membuat jumlah dana talangan yang lebih besar, yang harus dikeluarkan oleh pemerintah demi menggerakkan perekonomian.

"Transaksi perdagangan global mulai anjlok pada kuartal ketiga dan terus berlanjut hingga kuartal keempat 2008. Untuk sepanjang tahun 2008, Sekretariat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memperkirakan perdagangan global hanya tumbuh 4 persen," demikian isi laporan WTO tersebut.

Angka ini lebih rendah daripada pertumbuhan global pada 2006 sebesar 8,5 persen dan juga lebih rendah daripada pertumbuhan perdagangan global sebesar 5,5 persen pada tahun 2007.

Pada akhir April 2008, WTO memperkirakan perdagangan dunia akan bertumbuh sebesar 4,5 persen pada tahun 2008. Prediksi pertumbuhan perdagangan global yang rendah itu dilakukan berdasarkan kelesuan kegiatan ekonomi di negara maju.

Akan tetapi, pertumbuhan perdagangan terlihat lebih dahsyat jika dihitung dalam denominasi dollar AS. Pertumbuhan perdagangan global dalam dollar AS adalah 20 persen pada semester pertama 2008. Namun, perdagangan merosot tajam pada semester kedua dan menjadi negatif pada November tahun lalu, dalam denominasi dollar AS.

Nilai perdagangan didorong oleh kenaikan harga komoditas pada semester pertama. Namun, nilai perdagangan anjlok lagi pada kuartal kedua 2008 karena harga minyak menurun.

"Perkembangan kurs membuat nilai perdagangan tumbuh lebih cepat pada semester pertama dan menurun pada semester kedua 2008," demikian pernyataan dari laporan tersebut.

Di tengah melemahnya perekonomian global, pada laporan itu juga dinyatakan bahwa sebagian besar anggota WTO telah dapat berhasil mencegah proteksionisme.

Ketakutan proteksionisme juga muncul pada pertemuan Davos. Para politisi dan pemimpin perusahaan menekankan dampak tahapan berikutnya dari krisis ekonomi dapat membuat kebijakan pemerintah mengganggu perdagangan.

Ketidakadilan

Tanpa menyebutkan kemungkinan terjadi pelanggaran aturan perdagangan, anggota WTO, seperti Indonesia, Ekuador, India, China, dan Komisi Eropa, telah melakukan langkah-langkah untuk merangsang perdagangan.

Laporan itu juga merujuk paket dana talangan termasuk dari negara-negara industri. Dikatakan, dengan melemahnya perdagangan tampaknya paket-paket itu akan tetap diperlukan.

WTO menyebutkan, sebenarnya paket dana talangan itu dapat menjadi sumber ketidakadilan bagi beberapa institusi.

"Ketika menganalisis proses alokasi dana talangan, yang lebih fokus pada penyelamatan sektor keuangan, harus diperhatikan bahwa beberapa langkah itu akan membawa dampak negatif terhadap sektor lain atau membuat terjadi distorsi kompetisi antara institusi keuangan," demikian laporan WTO tersebut. (Kompas)

5. Indonesian navy rescues boat people from Myanmar

An Indonesian navy official says 198 boat people from Myanmar have been picked up off the coast of Aceh in critical condition.

Officer Tedi Sutardi, citing witness accounts, said Tuesday that 22 passengers died on a 21-day voyage from Thailand.

The small wooden boat was found by fisherman Monday drifting off northern Sumatra.

Sutardi says it had no engine and that the passengers had run out of food and water.

It is the second load of Rohingyas, a stateless Muslim group facing decades of persecution in Myanmar, to arrive in Indonesia in a month.

Sutardi says the survivors recounted being beaten and set adrift by Thai authorities. (The Jakarta Post)

6. Australia Bebaskan Sebuah Kapal Ikan Indonesia

Setelah sempat ditahan di Darwin selama 18 hari, sebuah kapal ikan usaha ventura Indonesia-Thailand (Indo-Thai Fishery Value) akhirnya dilepas Otoritas Manajemen Perikanan (AFMA) dan Imigrasi Australia, setelah para awak kapal dinyatakan tak melakukan kesalahan serius.

Sekretaris III/Staf Fungsi Pensosbud Konsulat RI Darwin, Wahono Yulianto, Selasa, mengatakan, kapal ikan berawak 28 orang itu ditangkap pada 28 Desember 2008 namun sudah dilepas pada 15 Januari lalu.

"Kapal ikan `APN-15` ini sudah kembali ke perairan Indonesia pada 15 Januari lalu bersama 25 orang awaknya, sedangkan tiga orang awak lainnya masih di Darwin karena alasan kesehatan," katanya.

Mereka terdiri dari dua orang Thailand dan seorang WNI. "Satu warga Thailand masih dirawat di rumah sakit dan satu lagi menginap di `detention center` (pusat penahanan) imigrasi, sedangkan warga kita sudah sembuh dari sakitnya dan akan dipulangkan Jumat ini (6/2)," katanya.

Dalam proses pemulangan kapal yang diawaki 15 warga Thailand dan 13 warga Indonesia itu, pihak berwenang Australia membekali mereka dengan pasokan air bersih, bahan pangan dan bahan bakar.

Mengutip pengakuan para awak kapal ikan "APN-15", Wahono mengatakan, mereka tidak sadar telah memasuki perairan Australia setelah mereka memperbaiki baling-baling kapal yang tersangkut perangkap ikan.

Pemerintah Australia serius melindungi kekayaan lautnya dari praktik "illegal fishing" (penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal-kapal ikan asing-red.)

Konsulat RI Darwin mencatat, sepanjang 2008, sedikitnya 544 orang nelayan Indonesia ditangkap dan ditahan di Darwin dalam kasus "illegal fishing". Jumlah ini menurun drastis dibandingkan jumlah nelayan yang ditangkap karena kasus yang sama tahun 2007. Pada 2007, Australia menangkap 980 orang nelayan Indonesia. (ANTARA)

7. RI Ratifikasi Konvensi Stockholm: Masih Perlu Dukungan Fraksi-fraksi di DPR

Bila tidak ada keberatan fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah Indonesia akan segera meratifikasi Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten. Rapat kerja teknis persiapan akan dibahas Rabu (4/2) bersama departemen.

Secara politik, ratifikasi menegaskan komitmen memperkuat kerja sama regional dan multilateral pengelolaan polutan organik yang persisten (POPs). Secara ekonomi, ratifikasi meningkatkan keberterimaan dunia akan produk Indonesia karena ramah lingkungan. Demikian dikatakan Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta kemarin.

Polutan organik yang persisten merupakan sekelompok senyawa kimia beracun dengan sifat sulit terurai dan cenderung berakumulasi baik di darat atau di air. Bahan POPs berdampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia secara langsung atau melalui rantai makanan. Hasil penelitian di negara maju, paparan senyawa POPs dalam jangka panjang menyebabkan kanker, merusak sistem susunan saraf, kekebalan tubuh, reproduksi, serta perkembangan bayi dan anak balita. Dalam lingkungan, paparannya mengurangi populasi burung, ikan, dan penipisan sel kulit telur burung pemakan ikan.

Ada 12 jenis bahan kimia POPs dalam tiga kategori, yaitu pestisida: aldrin, DDT, chlordane, dieldrin, endrin, heptachlor, mirex, dan toxaphene; bahan industri: hexachlorobenzene (HCB) dan polychlorinated biphenyls (PCB); dan bahan terbentuk tak sengaja akibat aktivitas manusia atau industri: dioksin dan furan.

Pertimbangkan serius

Wakil Ketua Komisi VII DPR Sonny Keraf menyatakan, dampak positif dan negatif ratifikasi konvensi patut dipertimbangkan. Dilihat dari dampak kesehatan dan lingkungan, bahan-bahan itu jelas berisiko dan berbahaya.

"Pada raker mendatang, kami harap dihadiri berbagai departemen, seperti pertanian, ristek, perdagangan, dan perindustrian," kata Sonny. Ia menegaskan perlunya pendataan bahan-bahan pengganti POPs.

Menurut Rachmat, beberapa bahan yang dilarang masih ditemukan. "Misalnya PCB dan DDT," katanya.

Di Asia Tenggara, bersama Malaysia dan Brunei, Indonesia belum meratifikasi konvensi itu. Sejak diberlakukan 17 Mei 2004 hingga Januari 2009, 164 negara telah meratifikasi konvensi itu. Direktur Multilateral Departemen Luar Negeri Rezlan Ihzar Jenie menyatakan, tahun 2009 jadi momentum tepat.

"Meratifikasinya akan menguatkan pengaruh dan postur Indonesia dalam isu lingkungan," katanya. (Kompas)

8. Bank Dunia-Jepang Bentuk Lembaga Keuangan Baru

Bank Dunia dan Jepang akan meluncurkan sebuah lembaga supervisi keuangan baru yang akan menyediakan modal untuk bank-bank di negara-negara berkembang yang sedang berjuang mengatasi dampak buruk krisis keuangan global, demikian International Financial Cooperation (IFC), Selasa.

IFC, sebuah anak perusahaan dari Bank Dunia yang menyediakan kanal investasi untuk pembangunan sektor publik di negara-negara berkembang dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) telah menandatangani kesepakatan tersebut.

IFC akan mengelola dana rekapitalisasi bank yang baru melalui sebuah perusahaan pengelola keuangan yang diunjukkan secara terpisah dan akan melayani bank-bank di pasar

ekonomi berkembang yang sekarang kesulitan memperoleh pendanaan alternatif menyusul krisis keuangan global.

"Lembaga ini akan membantu menjamin bank-bank di negara-negara berkembang untuk terus meminjamkan (kreditnya pada nasabah) dan mendukung pemulihan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja menembus krisis ekonomi dan keuangan yang sekarang terjadi," demikian Bank Dunia dalam pernyataan resminya.

Investasi sebesar dua miliar dolar AS yang dibenamkan JBIC dalam lembaga transnasional baru ini telah diumumkan oleh Perdana Menteri Shoichi Nakagawa selama pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia yang berlangsung Oktober lalu.

Bank Dunia menyebut kesepakatan ini ditandatangani Senin di kantor pusat JBIC di Tokyo oleh Lars Thunell, Wakil Presiden Eksekutif IFC, dan Kepala Eksekutif sekaligus CEO JBIC Hiroshi Watanabe.

"Dengan menanamkan dana di lembaga ini, kami berupaya mencegah (meluasnya) kekacauan pada sistem keuangan internasional dan perekonomian dunia. Kesepakatan dengan IFC adalah langkah penting demi menyelesaikan misi kami mencapai tujuan itu," kata Watanabe.

Thunell berterimakasih pada Jepang karena negara ini menjadi mitra pembangunan dan dengan murah hati berkontribusi untuk lembaga supervisi keuangan baru ini serta berharap lembaga ini tegak dan beroperasi sesegera mungkin.

IFC yang bermisi mendorong pertumbuhan ekonomi dalam upaya mengentaskan kemiskinan, melaporkan bahwa pada tahun fiskal 2008 yang berakhir pada 30 Juni telah berinvestasi total 16,2 miliar dolar AS atau naik 34 persen dibanding tahun sebelumnya. (ANTARA)

II. NASIONAL :

A. POLITIK :

1. **PEMBERANTASAN KORUPSI: Gebrakan KPK Dinilai Menurun**

Gebrakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai menurun karena sedikitnya penyelidikan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam beberapa bulan terakhir.

"Mungkin sebagian personel KPK mulai merasa lelah sehingga kinerja institusi penegak hukum itu terlihat menurun," kata Presiden Perjuangan Hukum dan Pembangunan (PHP) HMK. Aldian Pinem di Medan, Senin.

Menurut Pinem, kinerja KPK dalam beberapa bulan terakhir terkesan kurang `menggigit` jika dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya.

Diperkirakan, banyak faktor yang menyebabkan hal itu, di antaranya muncul rasa lelah di kalangan personel KPK karena telah mengerahkan energi yang cukup banyak sebelumnya. Hal itu patut dimaklumi karena dengan personel yang relatif sedikit, KPK telah menyelidiki banyak kasus besar yang menarik perhatian masyarakat.

Namun kondisi itu diharapkan tidak sampai menyebabkan kinerja KPK yang telah mampu membangkitkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum menjadi menurun.

"KPK perlu mencari solusi baru. Jika personelnnya kelelahan, lakukan saja pergantian (personel) untuk mendapatkan tenaga yang lebih segar," katanya.

Namun, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Dr Runtung Sitepu menilai kondisi itu merupakan strategi KPK dalam penyelidikan. Mungkin, kata Sitepu, KPK ingin mengubah strategi penyelidikannya yang sering melakukan ekspose ke media baru melakukan pendalaman kasus untuk mencari bukti yang kuat.

Ke depan, katanya, KPK mungkin lebih mengutamakan pendalaman kasus guna mendapatkan bukti yang kuat, setelah itu baru mengeksposnya ke media.

Sementara itu di Jakarta, kemarin, Wakil Ketua KPK Haryono mengatakan, KPK mendalami pengalihan status rumah dinas milik negara menjadi rumah dinas atas nama sejumlah dosen.

Haryono mengatakan, beberapa rumah dinas itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi setelah statusnya beralih menjadi milik pribadi.

Hingga kini, KPK baru mandalami pengalihan status rumah dinas yang terjadi di Universitas Brawijaya, Malang. Untuk kasus tersebut, KPK telah memanggil Rektor Universitas Brawijaya dan pejabat terkait.

Haryono menilai, penguasaan rumah dinas oleh dosen lama akan menghambat distribusi aset negara karena dosen baru tidak akan mendapat bagian. "Kami minta agar rumah segera ditinggalkan," kata Haryono.

Sebelumnya, KPK menemukan 29 status rumah golongan II telah berganti menjadi atas nama para dosen yang menempati. Hal itu bertentangan dengan ketentuan bahwa rumah dinas golongan II adalah aset negara yang tidak boleh beralih status. (Suara Karya)

2. Isu ABS, SBY Seret TNI/Polri ke Ranah Politik

Tindakan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menggulirkan isu adanya gerakan Asal Bukan Capres S (ABS) di hadapan TNI/Polri, dinilai merupakan keputusan kontraproduktif. SBY sama saja menggeret-geret TNI. Polri kembali ke ranah politik yang sama sekali bukan merupakan wilayah pertempuran alat pertahanan dan keamanan negara tersebut.

"SBY tak pantas menyampaikan curhat politiknya di hadapan TNI/Polri seperti itu, sama saja mengajak TNI/Polri kembali bermain ke wilayah politik," ujar Ketua Fraksi PKB, Effendy Choirie, usai mengikuti rapat konsultasi pimpinan dan fraksi di gedung DPR, Jakarta, Senin (2/2) petang. "Kalau mau curhat seperti itu seharusnya dengan Partai Demokrat saja," sambung Effendy.

Dikatakan, TNI/Polri bukanlah lembaga politik yang bisa diajak bicara tentang kondisi perpolitikan yang terjadi saat ini. Sebagai presiden, seharusnya SBY menyadari TNI/Polri merupakan alat negara yang mengurus masalah ketahanan dan keamanan.

Kalaupun SBY ingin berbicara masalah-masalah kebangsaan dengan TNI/Polri, semestinya tema yang diangkat menyoal profesionalisme dan tantangan TNI/Polri ke depan. "Tapi kalau bicara politik, kan sama saja menggoda atau merangsang TNI/Polri untuk kembali berpolitik," imbuh Effendy.

Karena itu, Effendy tak menyalahkan opini kebanyakan orang yang menduga SBY tengah mengalami kegelisahan dan kekhawatiran luar biasa untuk mempertahankan kekuasaannya.

Padahal, seorang politisi yang handal tentulah tidak akan mengalami kegelisahan dan kekhawatiran yang berlebihan menjelang akhir masa kekuasaannya. "Memang wajar kalau orang itu gelisah tidak bisa menang, lawan politiknya pasti juga merasakan hal yang sama, tapi kan tidak perlu ditunjuk-tunjukkan kekhawatiran itu," papar Effendy.

Di sisi lain, pernyataan SBY juga dipandang mampu merusak upaya depolitisasi di tubuh TNI/Polri yang selama ini tengah berjalan cukup baik. "Jadi saya pikir SBY harus lebih hati-hati mengeluarkan pernyataan," tandas Effendy. (Republika Online)

B. EKONOMI :

1. Ekspor Nonmigas 2008 Lampau Target

Pertumbuhan ekspor nonmigas 2008 mencapai 107,8 miliar dolar AS atau tumbuh 17,16 persen jika dibandingkan kinerja 2007 dan melampaui target pemerintah sebesar 14,5 persen.

"Kalau melampaui target pemerintah untuk ekspor, itu benar. Tapi target 2009 kita lihat saja nanti," kata Deputy Kepala BPS, Ali Rosidi di Jakarta. Ekspor golongan lemak dan minyak hewan/nabati yang 80 persennya termasuk minyak sawit mentah (CPO) masih menyumbang porsi terbesar terhadap kinerja ekspor nonmigas Indonesia 2008 yaitu 14,46 persen. Ekspor golongan tersebut pada 2007 senilai 10,23 miliar dolar AS dan meningkat menjadi 15,53 miliar dolar AS.

Penyumbang kinerja ekspor kedua terbesar adalah bahan bakar mineral yang ekspornya mencakup 9,89 persen dari total ekspor nonmigas Indonesia. Nilai ekspor bahan bakar mineral Indonesia selama 2007 mencapai 7,12 miliar dolar AS dan naik menjadi 10,67 miliar dolar AS selama 2008.

Ekspor mesin/peralatan listrik menyumbang 7,51 persen terhadap kinerja ekspor nonmigas 2008. Ekspornya pada 2007 mencapai 7,52 miliar dolar AS dan naik menjadi 8,09 miliar dolar AS pada 2008.

Ekspor karet dan barang dari karet menyumbang 7,04 persen terhadap kinerja ekspor nonmigas 2008. Ekspornya pada 2007 mencapai 6,25 miliar dolar AS dan naik menjadi 7,59 miliar dolar AS pada 2008.

Ekspor mesin-mesin/pesawat mekanik mencakup 4,84 persen dari total ekspor nonmigas Indonesia 2008. Ekspornya pada 2007 mencapai 4,68 miliar dolar AS dan naik menjadi 5,21 miliar dolar AS pada 2008.

Kelima jenis kelompok barang tersebut selama Desember 2008 nilai ekspornya mengalami penurunan nilai ekspornya antara 14 juta dolar AS hingga 300an juta dolar AS dibanding November 2008.

Lima kelompok barang ekspor lainnya yang masuk dalam 10 penyumbang ekspor terbesar dan kinerjanya masih tumbuh selama 2008 adalah bijih, kerak, dan abu logam (4,04 persen), kertas/karton (3,46 persen), pakaian jadi bukan rajutan (3,15 persen), barang-barang rajutan (2,42 persen), dan perabot, penerangan rumah (1,83 persen).

Ekspor bijih, kerak, dan abu logam mengalami kenaikan dari 5,10 miliar dolar AS pada 2007 menjadi 4,36 miliar dolar pada 2008. Ekspor kertas/karton mengalami kenaikan dari 3,33 miliar dolar AS pada 2007 menjadi 3,73 miliar dolar AS selama 2008. Ekspor pakaian jadi bukan rajutan naik dari 3,31 miliar dolar AS pada 2007 menjadi 3,39 miliar dolar AS pada 2008. Ekspor barang-barang rajutan naik dari 2,32 miliar dolar AS pada 2007 menjadi 2,61 miliar dolar pada 2008. Sedangkan ekspor perabot, penerangan rumah naik dari 1,99 miliar dolar AS pada 2007 menjadi 1,97 miliar dolar AS pada 2008.

Selama periode Januari-Desember 2008, ekspor dari 10 golongan barang (HS 2 digit) di atas memberikan kontribusi 58,64 persen terhadap total ekspor nonmigas.

Dari sisi pertumbuhan, ekspor 10 golongan barang tersebut meningkat 21,91 persen terhadap periode yang sama tahun 2007. Sementara itu, peranan ekspor nonmigas di luar 10 golongan barang itu pada Januari-Desember 2008 sebesar 41,36 persen.

BPS mencatat total nilai ekspor Indonesia secara kumulatif Januari-Desember 2008 mencapai 136,76 miliar dolar AS atau naik 19,86 persen dibanding kinerja 2007.

Ekspor hasil pertanian, industri, pertambangan masing-masing mengalami kenaikan sebesar 34,98 persen, 15,15 persen, 24,62 persen dibandingkan 2007. (Republika Online)

2. Indonesia Peroleh Komitmen Pinjaman Hingga US\$ Miliar

Menghadapi risiko gejolak pasar dunia belakangan ini, Indonesia mendapatkan dukungan dana hingga US\$6 miliar. Dana yang berasal dari komitmen bilateral dan multilateral itu bakal digunakan untuk mengamankan asumsi makro perekonomian nasional.

Hal itu dikatakan Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati se usai rapat terbatas di Jakarta, Senin (2/2). Ia menyebutkan selain mendapatkan support pengaman tersebut, pemerintah juga menerbitkan obligasi dengan denominasi dolar AS. "Suport hampir US\$6 miliar itu cukup untuk keseluruhan kebutuhan bond issues kita," ungkapnya.

Ia menyebutkan, pemerintah juga melihat bahwa saat ini telah terjadi momentum penurunan harga sejumlah komoditi. Dan hal ini akan terus berlangsung terhadap komoditi lain. "Sehingga yang perlu dijaga adalah memonitor dan terus memanager kondisi stabilitas harga komoditi tersebut," katanya.

Namun, jelasnya, pemerintah tetap akan membuat kebijakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini dilakukan dalam bentuk seperti kenaikan gaji ke-13, renumerasi, raskin, dan bantuan langsung tunai.

"Diharapkan untuk tahun ini konsumsi masyarakat masih tumbuh. Karena dalam kondisi resesi dunia yang menjadi game paling utama adalah menjaga permintaan. Sehingga ekonomi bisa tetap tumbuh," jelasnya. (Media Indonesia)

3. **CADANGAN DEvisa Kuartal IV, Dana Parkir Masuk Indonesia**

Cadangan devisa Indonesia hingga akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 51 miliar dolar AS.

Jika pemilu lancar dan menghasilkan pemerintahan yang kredibel, dana-dana yang diparkir di luar negeri diharapkan bisa kembali masuk dan memperkuat cadangan devisa Indonesia.

Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono, Senin, untuk tahun 2009, berdasarkan pengalaman tahun 2004, dengan pemilu yang berjalan baik dan terbentuknya kabinet yang kredibel, pada kuartal IV 2009 akan terjadi aliran dana yang cukup besar.

"Sebagian besar dana itu adalah dana-dana milik orang-orang kita yang untuk sementara diparkir di luar negeri menunggu kepastian situasi politik di dalam negeri. Berdasarkan perhitungan kami, cadangan devisa 2009 diperkirakan sebesar 51 miliar dolar AS, cukup untuk membiayai 4,7 bulan impor plus pembayaran utang luar negeri pemerintah," kata Boediono.

BI juga memperkirakan neraca transaksi berjalan pada tahun 2009 akan defisit hingga 0,11 persen dari produk domestik bruto.

Namun, Boediono menjelaskan, walaupun ekspor diperkirakan turun tajam pada tahun ini, melemahnya perekonomian akan menyebabkan impor barang konsumsi dan investasi mengalami penurunan tajam. Apalagi ekspor Indonesia juga mempunyai kandungan impor yang cukup tinggi.

Selain itu, penurunan kegiatan transportasi seiring anjloknya ekspor akan juga mengurangi impor jasa-jasa untuk transportasi.

"Faktor-faktor ini menjadikan kita tidak perlu khawatir akan neraca pembayaran kita. Bahkan, apabila perekonomian domestik melemah, anjloknya impor dapat berpotensi menyebabkan kembalinya surplus transaksi berjalan," kata Boediono. (Suara Karya)

4. **Government to maintain fuel prices during 2009**

The government will likely maintain the latest prices of Premium gasoline, diesel and kerosene until the end of 2009, the president says.

President Susilo Bambang Yudhoyono said on Monday that the current prices are "appropriate" and "in accordance" with the projected movement of global crude oil prices and with the composition of the 2009 state budget.

"At market levels, the prices of Premium tend to rise above Rp 4,000 per liter; diesel tends to decline from Rp 5,000 per liter, and kerosene tends to stay at Rp 5,000 per liter.

"Given these conditions, the government will continue subsidies for diesel and kerosene," Yudhoyono said, addressing a press conference after a Cabinet meeting at the Presidential Palace. Given the low price, Premium is no longer subsidized.

The government has predicted, based on the analysis of the movement of global crude oil prices, that the Indonesian Crude Price (ICP) would range between US\$40 and \$60 per barrel during 2009.

It will therefore maintain domestic prices of Premium gasoline at Rp 4,500 (36 US cents) per liter, diesel at Rp 4,500 per liter and kerosene at Rp 2,500 per liter, as set on Jan. 15.

Coordinating Minister for the Economy Sri Mulyani Indrawati said the government's decision to maintain the current level of fuel prices was based on forecast trends in global oil prices up until the end of 2009, as well as recent trends during the second half of 2008.

"You can also see that fuel prices are not solely determined by the international market, but there are also currency fluctuations.

"By taking all things, including the price trend in January and over the next 11 months, into consideration, the president thinks the prices set on Jan. 15 are already appropriate," explained Mulyani.

The president also said, citing a report from Transportation Minister Jusman Syafii Djamal, that the fuel price cuts over the past four months had resulted in a cut in public transportation fares by between 10 and 20 percent across a number of regions.

The government has cut the fuel price three times in the past few months following falls in global crude oil prices.

The government policy changes have been exploited to boost Yudhoyono's popularity ahead of the July presidential election, so as to claim credit for what could be attributed to the impact of the economic downturn in developed economies.

An official at the Transportation Ministry, who asked not to be named, told The Jakarta Post that transportation fare cuts had been implemented in respect of commuter train services for Greater Jakarta and for ferry services out of or into Java island.

Fare cuts had not yet been implemented in public transportation services in provincial cities, where much depended on the policies of local mayors or regents.

Yudhoyono said that with the cut in fuel prices and the industrial electricity tariff, commodity prices, especially for basic necessities, were expected to decline.

Mulyani said this declining trend in commodity prices were expected to continue at least until February. (The Jakarta Post)

C. SOSBUD :

1. Duta Besar Jepang Saksikan "Pintu Terlarang"

Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kojiro Shiojiri menyampaikan pujian pada sineas Indonesia sekaligus apresiasi positifnya setelah menyaksikan salah satu film thriller Indonesia berjudul "Pintu Terlarang" (Forbidden Door) bersama dua bintang film ini Fachri Albar dan Marsha Timothy.

"Saya ikut tegang menontonnya, filmnya bagus dan pesan yang ingin disampaikan film ini dapat saya pahami," katanya kepada ANTARA setelah menyaksikan film "Pintu Terlarang" bersama pemain dan produser film ini di Jakarta, Senin malam (2/2).

Kojiro mengatakan film karya sutradara Joko Anwar ini adalah film Indonesia yang pertama ia saksikan. Ia tidak menyangka Indonesia memiliki sineas-sineas muda yang sangat berbakat.

"Saya yakin sekali sebuah film itu berisi harapan dan impian, sebuah film juga mencerminkan karakter suatu bangsa. Karena itu saya yakin Indonesia memiliki banyak sekali orang-orang berbakat untuk membuat film berkelas seperti film ini," katanya.

Kojiro menambahkan Jepang juga memiliki banyak sineas yang karyanya dikenal luas. Meski film di Negeri Sakura itu belum menjadi sebuah industri yang besar, namun gairah untuk berkegiatan selalu ada.

"Saya pribadi sangat berkeinginan suatu hari nanti sineas Indonesia bisa kerjasama dengan sineas di Jepang dalam pembuatan sebuah film," katanya.

Kojiro adalah satu diantaranya banyak duta besar negara sahabat yang menyaksikan film "Pintu Terlarang". Produser film ini, Sheila Timothy menjelaskan pada 19 Januari lalu sejumlah duta besar perwakilan sejumlah negara di Jakarta turut diundang menyaksikan film ini.

"Mereka menyampaikan apresiasi positif terhadap film ini, bahkan beberapa duta besar menawarkan untuk memutarnya di negaranya," ujar Sheila.

Pintu Terlarang merupakan adaptasi dari sebuah novel thriller laris karya Sekar Ayu Asmara yang berjudul sama. Selain Fachri dan Marsha, film ini dibintangi oleh Ario Bayu, Otto Djauhari, Tio Pakusadewo, Henidar Amroe, dan Atiqah Hasiholan.

"Pintu Terlarang" mengisahkan tentang Gambir, pematung yang sukses dan hidupnya mulai berantakan setelah ia menerima pesan-pesan misterius dari seseorang yang meminta pertolongannya. Pesan misterius itu ternyata berasal dari seorang anak yang disekap dan disiksa oleh kedua orang tuanya.

Saat Gambir berusaha untuk mencari tahu di mana anak itu, ia curiga Talyda ada di balik misteri yang ingin dipecahkannya. Pada akhirnya, Gambir harus memilih antara menyelamatkan anak kecil itu atau kehilangan semua yang dia miliki dalam hidup.

Film ini mengandung pesan yang kuat tentang dampak buruk kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua. Dengan menggambarkan penyiksaan yang dialami Gambir kecil, Sekar Ayu Asmara dan Joko Anwar mengajak penonton untuk merenungkan bagaimana seharusnya orang tua mendidik dan memperlakukan anak dengan baik serta menghindarkan kekerasan dalam penyelesaian masalah. (ANTARA)

2. Alanda Duta Indonesia di Forum Pembuat Perubahan

Penampilan gadis mungil bertutur kata lembut yang menjadi wakil Indonesia dalam "Guildford Forum Global Changemakers" di Inggris itu memberikan kesan adanya segudang ide dan cita-cita di benaknya.

Sejumlah ide dan cita-cita yang Alanda Kariza (17) ungkapkan dalam pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Inggris dan Irlandia Yuri Octavian, boleh jadi, tidak terpikirkan remaja lain sebayanya.

Putri pasangan Arga Tirta Kirana dan Firman Maulana itu mengikuti forum pembuat perubahan sejagat di Inggris itu atas undangan British Council yang memiliki proyek "Forum Global Changemakers".

Selama seminggu, siswa SMA 82 Jakarta itu berkumpul bersama 58 remaja sebaya dari sejumlah negara, di dusun Horsley, Surrey, Inggris.

Mereka mendapat forum untuk saling bercengkerama dan bercerita mengenai kegiatan yang mereka lakukan di negaranya.

Katherine Hermans, manajer komunikasi "Global Changemakers", mengatakan, kegiatan yang digelar British Council itu bertujuan menggalang jejaring global bagi remaja usia 16 tahun sampai 25 tahun yang aktif dalam berbagai bidang di negerinya.

Dia mengatakan, organisasi itu bekerjasama dengan Forum ekonomi Dunia (WEF) dan berbagai forum internasional di Perserikatan Bangsa Bangsa memastikan suara anak muda dapat didengar di forum dunia.

Manajer Pengembangan Sosial British Council Indonesia Fajar Anugerah, yang mendampingi Alanda sejak dari Jakarta, mengatakan, bagi sebagian remaja di Indonesia, Alanda mungkin tidak asing lagi.

Remaja putri itu menerbitkan novel pertamanya "Mint Chocolate Chips" pada usia 14 tahun. Selain aktif sebagai penulis, wakil Indonesia itu juga salah satu pendiri komunitas sosial "The Cure For Tomorrow" (TFCT), wadah untuk menggalang kepedulian remaja Indonesia tentang lingkungan hidup.

Menurut Fajar, Alanda membentuk komunitas tersebut karena merasa kecewa saat niatnya bergabung sebagai relawan ditolak beberapa LSM di Jakarta dengan alasan usianya yang masih terlalu muda.

Dia mengatakan, Alanda mewakili generasi muda Indonesia yang memiliki semangat positif. Generasi muda yang ketika menghadapi kesulitan malah melihatnya sebagai tantangan.

Walaupun begitu, gadis manis yang juga aktif di bidang seni musik dan film ini tidak merasa dirinya spesial.

Menurut Alanda, dia bercita-cita ingin menjadi terkenal dan melanjutkan pendidikan di bidang sinematografi, walaupun orang tuanya mungkin kurang setuju.

Karyanya yang berjudul *Bunuh Diri Massal 2008* terbit dalam beberapa seri.

Menurut Fajar, sudah selayaknya putri pertama dari tiga bersaudara dan remaja Indonesia lainnya yang memiliki semangat dan penuh aspirasi positif diberikan kesempatan seperti yang diberikan British Council.

Yuri Octavian Thamrin mengatakan, dirinya siap mencarikan beasiswa bila Alanda diterima di Universitas Oxford.

Disela sela kunjungannya ke Kerajaan Ratu Elizabeth, Alanda juga mengunjungi obyek wisata seperti museum Madame-Tussauds, menonton pertunjukkan musikal *Lion King* di West End London, dan berkunjung ke kandang klub sepakbola kenamaan Inggris Manchester United.

Dia sempat memborong kaos bola sebagai oleh-oleh untuk ayah dan juga teman-temannya., ujar Fajar Anugerah yang juga ikut dalam konperensi tersebut.

Dikirim ke Davos

Dari sebanyak 58 remaja yang berkumpul di sebuah desa di Inggris itu akan dipilih sebanyak delapan orang yang akan mengikuti pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

Bagi Alanda, ia merasa senang jika bisa terpilih dalam kegiatan tersebut, karena dapat memberikan yang terbaik dan mendapat pengalaman berharga.

"Tapi, pergi ke Davos maupun tidak, tidak menjadi masalah. Yang penting saya bisa berbagi dengan anak-anak Indonesia yang lainnya agar menghasilkan sesuatu dan membuat

negara menjadi lebih baik," ujar penggemar "Star Wars" itu yang juga aktif dalam kampanye antirokok.

Gadis yang berharap bisa masuk di acara "The Oprah Winfrey Show" itu mengatakan, terpilih mewakili Indonesia dalam "Guildford Forum Global Changemakers" membuat dirinya senang sekaligus gugup karena mengemban tugas yang sangat berat.

"Mengingat saya satu-satunya wakil dari Indonesia dan ini pengalaman pertama ditambah lagi saya termasuk yang termuda dibanding peserta lain," ujar perempuan yang biasa disapa Nda saat ditemui di Horsley Park.

"Aku selalu berpikir bahwa sekecil apapun usaha atau semangat atau bahkan hanya niat, pasti membuahkan hasil," ujar penggemar Kejuaraan Sepakbola Dunia dan film film Disney, termasuk Lion King.

Penggemar musik "Earth Wind & Fire" itu mengaku, selama mengikuti "Global Changemakers", ia berkenalan dengan banyak orang dan memperluas wawasan serta pengalaman. "Mungkin klise, tapi ini adalah suatu hal yang sangat penting," ujarnya.

Bagi penggemar Bruce Lee itu, jejaring merupakan salah satu cara membuka jalan baginya untuk menjalin hubungan yang luas.

Sebelum berangkat, Alanda menyiapkan presentasi, selain menghafal yang pernah dilakukan dan menyiapkan materi publikasi LSM yang didirikannya.

Alanda, yang senang menonton film dan berkunjung ke perpustakaan itu, memiliki kegiatan menulis yang dimulainya sejak di sekolah dasar, berupa essay dan berbagai macam artikel.

Novel perdana Alanda diterbitkan ketika dia berusia 14 tahun dan berkat debut novelnya, Nda menjadi salah satu unggulan "CosmoGIRL! Of The Year" dan bahkan terpilih sebagai "CosmoGIRL! Of The Month" bulan April.

Saat ini Nda tengah menyelesaikan kumpulan cerpen yang mengangkat isu sosial dan satu novel fiksi sain.

Penggemar film Disney, seperti "Ice Age II: The Meltdown", "Spiderman", "The Lion King", "Harry Potter", "The Chronicles Of Narnia" itu hingga saat ini merampungkan dua novel percintaan dan persahabatan remaja.

Dia juga menjadi penulis lepas di rubrik feature Majalah Gogirl!, menulis cerita pendek dan artikel di Majalah Hai dan Warta Al-Azhar, dan mengisi waktu luangnya dengan mengajar les adik-adik di SD dan mengkampanyekan gerakan anti-rokok.

Alanda yang memiliki segudang prestasi itu berharap usai mengikuti "Global Changemarker" akan melanjutkan proyek "Community Action Projects" (CAP), dan untuk itu ia juga membutuhkan dukungan dari remaja sebayanya.

Selain itu, dia bertekad membentuk "Youth Parliament" di tanah seperti yang dilihatnya di Inggris, agar suara remaja juga bisa terdengar.

"Aku juga ingin mengumpulkan remaja dari berbagai propinsi, ya semacam 'Global Changemarkers' dalam bentuk mini," kata Alanda Kariza. (ANTARA)

3. **2008,Wisman Capai 6,4 Juta Orang**

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah total kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia selama 2008 mencapai 6,43 juta orang.

Deputi Kepala BPS Ali Rosidi menjelaskan, angka itu terdiri atas 6,23 juta orang wisman yang masuk lewat 11 pintu utama dan pintu masuk lainnya,serta 194.500 orang pengunjung yang transit di Indonesia. "Jumlah wisman yang datang ke Indonesia pada Januari–Desember 2008 mencapai 6,23 juta orang, atau meningkat 13,24% dibanding periode yang sama 2007 sebanyak 5,51 juta orang,"ujar Ali di Jakarta kemarin.(Koran Sindo)

D. **HANKAM** :

1. Pulau Nipah Batas Laut Indonesia-Singapura

Pulau Nipah disepakati sebagai batas laut teritorial Indonesia dengan Singapura. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, kesepakatan itu berdasarkan persetujuan bersama pada segmen tengah dari batas laut teritorial yang ditetapkan pada 1973.

Presiden mengatakan, dengan kesepakatan tersebut, Indonesia diharapkan dapat mengembangkan kerja sama dan kegiatan ekonomi di kawasan ini. "Dengan telah pastinya garis batas ini, pengembangan ekonomi Indonesia di wilayah itu termasuk kerja sama dengan Singapura dan Malaysia," ujar Presiden SBY dalam keterangan pers di Kantor Kepresidenan Jakarta kemarin.

Presiden menambahkan, Februari 2005, perundingan tersebut kembali dilakukan dan mengalami kemajuan setelah sekian puluh tahun terhenti. Kesepakatan tersebut secara resmi akan ditandatangani kedua negara pada Februari ini. Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda akan mewakili pemerintah Indonesia untuk menandatangani kesepakatan tersebut. Dari segi geopolitik, lanjut Presiden, akan lebih jelas lagi mengenai batas wilayah Indonesia dan Singapura. Dengan demikian, kerja sama kedua negara dapat lebih baik.

"Singapura, Indonesia, Malaysia juga melakukan kerja sama yang disebut kerja sama keamanan dengan mengamankan Selat Malaka," tandasnya. Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan perjanjian batas laut teritorial bagian barat itu akan ditandatangani sekitar pertengahan Februari ini. Dengan disepakatinya batas laut teritorial bagian barat, Indonesia dan Singapura masih menyisakan perundingan batas laut teritorial bagian timur yang terletak di atas Bintan (Indonesia) dan Bandara Changi (Singapura).

"Bagian timur memang kita minta untuk dibicarakan sekaligus, namun Singapura meminta ditunda karena masih ada sengketa dengan Malaysia mengenai Batu Puteh," tuturnya kemarin. (Koran Sindo)

2. ALUTSISTA: Tiga Sukhoi Resmi Diserahkan ke Pemerintah Indonesia

Sebanyak tiga pesawat jet tempur Sukhoi seri SU-30MK2 resmi diserahkan pemerintah Rusia ke pemerintah Indonesia, untuk segera melengkapi empat Sukhoi seri SU-30MK dan SU-27SK yang telah dioperasikan TNI Angkatan Udara (AU) sejak 2003.

Penyerahan ditandai dengan pemberian log book pesawat secara simbolis oleh Dubes Rusia untuk Indonesia Alexander Ivanov mewakili pemerintah Rusia dan FSUE Rosoboronexport kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (Dephan) Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin mewakili pemerintah Indonesia, di depan Gedung Galaktika Pangkalan Udara (Lanud) Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (1/2).

Selanjutnya, tiga pesawat tersebut diserahkan Irjen TNI Mayjen TNI Lilik S Sumaryo yang kemudian menyerahkannya kepada Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsekal Madya TNI Wardjoko.

Sebelum diserahkan, tiga pesawat jet tempur Sukhoi SU-30MK2 yang tiba secara bertahap pada 26 Desember 2008 dan 17 Januari 2009 itu, telah menjalani uji terbang oleh pilot Rusia di Lanud Sultan Hasanuddin.

Dengan kehadiran tiga unit Sukhoi itu, kini TNI AU memiliki tujuh pesawat yang memiliki julukan "flanker" tersebut. Tiga unit lainnya, yakni jenis SU-27SKM akan tiba pertengahan 2009 dan 2010.

Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono dalam sambutannya yang dibacakan Sekjen Dephan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, kedatangan tiga pesawat Sukhoi ini dapat meningkatkan peran dan tugas TNI, khususnya TNI AU untuk mempertahankan dan menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.

"Karena itu, saya berharap agar pesawat ini dapat dioptimalkan pengoperasionalannya, termasuk pemeliharaan dan perawatannya," ujarnya.

Juwono mengatakan, penempatan skadron udara Sukhoi di Makassar berdasarkan pertimbangan taktis dan strategis. Pesawat tempur Sukhoi tersebut menggantikan peran pesawat A-4 Skyhawk dan berbasis di Skadron Udara 11 Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. (Suara Karya)

E. HUKUM :

1. LEGISLASI: RUU Rahasia Negara Ingin Ditunda

Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (2/2), berkeinginan menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara. Mereka tidak ingin pembahasan RUU ini terlalu dipaksakan, sementara Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik belum diimplementasikan.

Abdillah Toha dari Fraksi Partai Amanat Nasional berpandangan, pembahasan RUU Rahasia Negara ini sebaiknya dilakukan DPR periode berikutnya.

"Dulu itu sudah ada kesepakatan tidak tertulis bahwa UU KIP adalah induknya. Sekarang induknya belum keluar, masa anaknya sudah keluar," ujar Abdillah, Senin (2/2), sebelum rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono membahas RUU Rahasia Negara.

UU KIP, meski sudah disahkan menjadi undang-undang, baru akan berlaku pada 2010. Sebagian besar substansi RUU Rahasia Negara juga sudah diatur dalam UU KIP karena di dalamnya sudah diatur tentang informasi-informasi yang dikecualikan.

Jenis rahasia negara

Menurut Andreas Pareira dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ada celah untuk menunda pembahasan RUU Rahasia Negara. Soalnya, RUU usulan pemerintah itu belum mengatur jenis rahasia negara dalam bentuk benda dan/atau fasilitas, serta aktivitas.

"Tadi saya sudah tanyakan dan kelihatan teman-teman arahnya ke sana," ujarnya.

Staf ahli Menteri Pertahanan, Agus Subroto Susilo, dalam rapat menjelaskan jenis rahasia negara berupa benda atau aktivitas akan diatur dalam UU tersendiri. Alasannya, soal itu sudah diatur di banyak UU lain.

Dia menepis kekhawatiran Sutradara Gintings dari F-PDIP bahwa pengaturan terpisah akan menyulitkan akses publik untuk mendapatkan informasi.

Almuzzammil Yusuf dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengingatkan, salah satu pemerintahan yang bersih adalah menegakkan pilar transparansi. Menurut dia, definisi informasi publik dalam UU KIP sudah memasukkan substansi benda dan juga kegiatan. (Kompas)

F. OLAH RAGA : Tidak Ada

G. LINGKUNGAN HIDUP :

1. Kebijakan Sektor Kehutanan yang Menzalimi Rakyat Indonesia

Buku *The Federalist* memuat diskusi antara tiga Bapak Bangsa Amerika Serikat, yakni Alexander Hamilton, John Adam, dan John Jays sebelum bersepakat mendirikan negara federal Amerika Serikat pada tahun 1776.

Pertanyaan yang diajukan dalam diskusi tersebut, di antaranya, "What do we want (Apa yang ingin kita capai)?" Mereka menjawab, kita ingin mencapai kebahagiaan atau happiness. Mereka sepakat bahwa tidak mungkin bisa bahagia jika kita tidak merdeka (liberty). Kesepakatan lainnya, tidak mungkin merdeka bila tidak memiliki pemerintahan sendiri (self government). Lebih jauh, mereka juga bersepakat bahwa tidak mungkin memiliki pemerintahan sendiri jika kita tidak memiliki konstitusi (constitution). Pada akhirnya, mereka kemudian bersepakat bahwa tidak mungkin kita memiliki konstitusi, undang-undang dan peraturan yang baik jika tidak dimulai dengan akhlak (moral) yang baik.

Jika belajar dari pengalaman bangsa Amerika Serikat dalam mendirikan suatu negara, membuat konstitusi dan undang-undang serta peraturan dari akhlak (moral) yang baik. Artinya konstitusi, dan undang-undang serta peraturan yang dibuat haruslah dimulai dengan moral yang baik dan selalu berpihak kepada usaha-usaha untuk mencerdaskan dan memperkaya rakyat. Jadi, tidak dibuat untuk menzalimi dan menyengsarakan rakyat.

Lantas, bagaimana yang terjadi di sektor kehutanan Indonesia? Seperti diketahui, Undang-Undang tentang Penataan dan Pengaturan Hutan bisa dikata sangat menzalimi rakyat

karena Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hutan Tanaman Industri (HTI) hanya diberikan kepada para pengusaha. Alasan pemerintah, yang bisa mendapatkan hak tersebut adalah badan usaha, yang sudah tentu jika diserahkan kepada rakyat, mereka tentu tidak sanggup memenuhi keharusan membentuk badan usaha.

Penulis kemudian memberikan contoh mengenai Izin Area HPH yang diberikan undang-undang kepada pengusaha A seluas 100.000 hektare. Apa artinya pemberian izin itu? Pertama, dengan izin tersebut berarti pengusaha mempunyai hak menguasai hutan hingga 35 tahun. Dengan hak penguasaan itu, rakyat sekitar hutan tidak boleh masuk ke areal HPH untuk mengambil rotan, damar, madu, dan hasil hutan lainnya. Jika memaksakan diri, akan dituduh melakukan pencurian atau merusak milik negara?

Bayangkan saja! Sudah pernah ada seorang pengusaha di Indonesia ini diberi HPH seluas 5,5 juta hektare, yakni hampir separuh luas Pulau Jawa. Ini sangat aneh dan hanya terjadi di Indonesia!

Setelah Nabi Sulaiman, barulah terjadi di dalam sejarah umat manusia ada seorang yang diberi hak untuk menguasai hutan tropis seluas 5,5 juta hektare. Hal yang sama, yakni praktik menzalimi rakyat, terjadi juga pada kasus HGU dan HTI.

Di negara yang memihak kepada rakyat, izin HPH diberikan secara khas dan tertentu. Misalnya, kepada pengusaha A diberikan izin untuk menebang pohon mahoni yang diameternya 50 cm ke atas.

Apabila di dalam praktiknya si pengusaha menyimpang dari izin itu, si pengusaha itu pasti diberi hukuman yang setimpal. Menurut rekan saya, Dr Jatna Supriyatna dari Conservation International Indonesia (CII), dalam hal pemberi izin HPH, HGU, dan HTI ini, Indonesia adalah negara yang paling bodoh sebelum negara-negara Afrika? (Sinar Harapan)

2. JICA Bantu Lestarkan Mangrove Pulau Kembang

Japan International Cooperation Agency (JICA) akan membantu pengelolaan dan pelestarian hutan *mangrove* di wilayah objek wisata Pulau Kembang, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan.

Rencana bantuan Jepang tersebut terungkap dalam pertemuan dengan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalsel bersama pihak terkait termasuk dengan pengelola kepariwisataan, kata Ketua Asita Kalsel, Dra Hj Armistiyani, Senin.

Pihak Asita Kalsel menyambut gembira rencana pelestarian hutan *mangrove* Pulau kembang tersebut, karena disana merupakan objek wisata andalan Kalsel terdapat ribuan kera abu-abu yang jinak menjadi objek wisatanya.

Selain itu, Pulau Kembang juga merupakan habitat kera Bekantan (*Nasalis larvatus*) yang selama ini menjadi maskot Kalsel, yang harus dilestarikan.

Bukan hanya kera terdapat di kawasan hutan yang merupakan delta di Sungai Barito tersebut, tetapi juga terdapat puluhan *species* burung, *species* biawak, ular, dan satwa lainnya.

Kawasan objek wisata yang paling dekat dengan Kota Banjarmasin tersebut belakangan sudah mulai terganggu setelah adanya dok kapal serta lokasi bertambatnya tongkang-tongkang pengangkut batubara berbobot besar hingga sisi pulau itu mulai rusak.

Padahal objek wisata Pulau Kembang yang dikenal punya legenda dalam kehidupan etnis China tersebut harus dilestarikan agar objek itu kian menarik bagi wisatawan.

Oleh karena itu adanya keinginan JICA Jepang itu harus direspon positif sekaligus didukung keinginan itu.

Kedua orang dari JICA Jepang mengikuti dalam pertemuan tersebut, dan berjanji akan segera menerjukkan peneliti untuk mengetahui kondisi kawasan hutan *mangrove* Pulau Kembang.

Dari hasil penelitian itulah nantinya pihak Jica bisa mengambil langkah selanjutnya dalam upaya pelestarian, kata Armistiyani seraya menyatakan kurang ingat nama jelas JICA Jepang tersebut.

(ANTARA)

III. ARTIKEL :

1. **PERTAHANAN: Indonesia Harus Waspada Ancaman Nonmiliter**

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Prof Dr Muladi mengatakan ancaman bahaya keamanan tidak hanya bersumber pada hal-hal yang bersentuhan dengan terminologi politik yang berkaitan dengan pertahanan berupa serangan militer dari luar saja.

Menurut dia, saat ini muncul tantangan-tantangan baru seperti, ancaman kesehatan penyakit (infeksi menular; SARS dan flu burung), bencana alam, perdagangan ilegal narkoba, terorisme, yang juga sangat mengancam dan berbahaya baik bagi negara maupun umat manusia.

"Kondisi ini telah mengubah pandangan manusia, bahwa ancaman keamanan tidak bersumber pada serangan militer saja dimana ini merupakan fokus eksklusif dari kebijakan keamanan. Artinya, pengertian keamanan dalam arti sempit mulai dipertanyakan dan seharusnya juga mencakup ancaman keamanan yang non-militer," kata Muladi pada saat menjadi pembicara dalam acara Pendidikan Ketahanan Nasional (Diktanas) Pemuda yang diselenggarakan atas kerja sama Lemhannas dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Kantor Lemhannas, Jakarta, Senin (2/2).

Muladi mengatakan, ancaman yang bersifat nonmiliter (non traditional security (NTS), memiliki empat karakteristik yang luas, di antaranya, obyeknya mencakup negara dan kolektivitas, dan bersifat transnasional ditinjau dari aspek sumber, konsepsi dan akibat.

"Perlu ada perhatian yang sungguh-sungguh dari negara-negara di dunia atas ancaman NTS ini, karena potensi viktimisasi yang ditimbulkannya terhadap umat manusia sangat besar," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP KNPI Azis Syamsuddin berharap output dari acara dilkatnas pemuda ini bisa memperkuat wawasan kebangsaan kaum muda.

"Saya berharap ini bisa memberi motivasi baru tentang wawasan kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya bagi kaum muda," kata Azis yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR.

Dalam kesempatan itu, Azis yang menjelaskan soal posisi kepemimpinan di KNPI yang mengalami dualisme kepemimpinan, menurut dia, pemerintah telah memberikan kepada pengurus KNPI versi Kongres Bali.

"Namun dengan lapang dada dan demi kepentingan kaum muda, saya selaku ketua umum hasil Kongres Bali, meminta semua pihak untuk bisa saling berembuk kembali," katanya.

Makanya, pada tanggal 8 Februari mendatang pihaknya menjanjikan adanya forum pemufakatan atas permasalahan yang terjadi di KNPI.

"Kita tidak lagi melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi secara besar hati mari kita selesaikan masalah ini demi kepentingan bangsa," ujarnya.(Suara Karya)

IV. **LAIN-LAIN**

:

1. **Pascapertemuan Davos, Proteksionisme Mengental**

Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, yang baru saja ditutup, dinilai gagal memberikan solusi atas krisis keuangan global yang menimpa dunia. Forum itu dinilai hanya ajang adu urat leher tanpa memberikan solusi nyata.

Pendiri Forum Ekonomi Dunia Klaus Schwab mengatakan kepada jaringan pemberitaan Inggris BBC, Rabu (28/01), kesadaran dunia sudah mulai tampak bahwa betapa serius dan rumitnya krisis ini karena tumpang tindih dengan krisis yang lain. Dunia menghadapi krisis keuangan, krisis kepercayaan, dan di atas semua itu krisis sistem. Krisis yang terjadi, katanya, diakibatkan oleh ketidakseimbangan ekonomi dunia.

"Semua orang merasa terisolasi, semua orang ingin dimengerti. Tapi mengumpulkan orang-orang, politisi, pemimpin bisnis dan khususnya juga para pakar untuk duduk bersama dan untuk mencari tahu apa yang sebetulnya terjadi, saya pikir untuk itulah Davos seharusnya diselenggarakan," katanya.

Tapi yang terjadi, kata Klaus, peserta memanfaatkan pertemuan Davos merupakan untuk membangun kontak atau melancarkan bisnis. "Bagi para pengkritik, forum merupakan simbol

kalangan elit berduit yang merayakan diri mereka sendiri di kawasan wisata pegunungan Swiss," katanya.

Heiner Flassbeck, kepala ekonom pada Konferensi PBB Mengenai Perdagangan dan Pembangunan, UNCTAD, tidak optimis dengan rangsangan apapun dari Forum Ekonomi Dunia. "Davos tidak akan menghasilkan apapun. Jangan mengira orang-orang di sana duduk dan merenung selama 5 hari. Kalaupun itu mereka lakukan, waktu 5 hari terlalu singkat. Tapi mereka tidak melakukannya, mereka datang lalu pulang. Forum itu pertemuan besar tapi bukan dari makna acaranya," kata Flassbeck kepada Radio Jerman, Deutschlandfunk, Rabu (28/01).

Ia menyebut Davos murni sebagai pertemuan kelompok. Jika masyarakat dunia ingin krisis keuangan bisa dikendalikan, dibutuhkan peraturan perbankan yang ketat dan stabilisasi sistem moneter internasional.

Seharusnya peserta pertemuan Davos bisa duduk serius membahas krisis dunia. Ia membayangkan, bersama staf yang ahli di bidangnya, mencoba menganalisa masalah dan mengajukan usulan politis. "Seperti yang kami lakukan misalnya di Jenewa dan di tempat lain juga disiapkan. Lalu usulan itu harus ditinjau dan cepat diterapkan, karena hanya dengan begitu ia sempurna. Sejauh ini, di bidang peraturan pasar uang sama sekali tidak ada yang bisa dipegang," kata Flassbeck.

Sejak beberapa tahun terakhir, Klaus Schwab, memformulasikan tujuan Forum Ekonomi Dunia tidak kurang dari 'memperbaiki situasi dunia'. Menurut pendiri Forum Ekonomi Dunia itu, untuk tahun 2009 sudah cukup banyak yang dicapai jika Davos bisa ikut berkontribusi untuk sedikit memperbaiki situasi sistem keuangan, tiga bulan sebelum KTT Keuangan Dunia diselenggarakan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya Ikhsan Modjo mengatakan, alih-laih melahirkan sebuah komitmen, Forum Davos malah melahirkan sebuah kekuatan baru, yakni munculnya sikap proteksionisme oleh sejumlah negara. Proteksi itu justru menjadi "stimulus negatif" yang membuat krisis ekonomi dunia berkepanjangan.

Berikut, perbincangan **Very Herdiman** dari Harian *Jurnal Nasional* dengan pengamat ekonomi UNAIR **M. Ikhsan Modjo**:

Apa pendapat Anda kegagalan Forum Ekonomi Davos?

Saya kira forum ini gagal karena tidak ada kesepakatan, maksudnya tidak ada semacam komitmen bersama. Padahal forum itu diharapkan dapat memberikan stimulus perekonomian dunia. Tapi kenyataannya komitmen itu tidak keluar. Kegagalannya mungkin di situ, jadi hanya menghasilkan kesepakatan, tanpa ada komitmen. Forum Davos hanya melahirkan kesepakatan tapi tanpa ada komitmen konkrit.

Maksudnya seperti adanya belanja pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh negara-negara yang tergabung dalam forum itu. Jadi, forum ini sama saja seperti upaya ASEAN plus Amerika beberapa waktu lalu di Chiangmai. Mereka sepakat membuat semacam *regional fund* yang menangani dana yang diusulkan Presiden Filipina yakni sebesar 250 milyar US\$. Tapi ternyata tidak berhasil juga. Sampai sekarang belum ada persetujuannya. Di Davos ini ingin ditempuh hal serupa juga, tapi juga tidak terjadi.

Dengan kata lain, forum tidak mencapai kesepakatan strategis untuk mengatasi krisis ekonomi dunia?

Betul. Tidak ada kesepakatan strategis untuk mengatasi krisis. Bahkan, saya melihat pascaforum ini ada kecenderungan pengentalan proteksionisme. Jadi, di beberapa negara bahkan muncul kecenderungan untuk proteksionisme. Ini yang bagi saya sesungguhnya bahaya.

Apa bahayanya?

Pada saat krisis dunia perdagangan pasti akan mengendur. Karena ada krisis global masing-masing negara justru terlihat akan semakin bersikap protektif. Jadi, mereka akan coba melindungi pasar domestiknya untuk memperkuat konsumsi domestik. Tapi kalau justru itu yang terjadi, malah bisa semakin menyebabkan kian lambannya pemulihan ekonomi dari resesi yang sudah terjadi di banyak negara. Karena banyak negara yang sangat tergantung pada perdagangan, seperti Hongkong, China atau Singapura.

Mana kubu yang memainkan kartu proteksionisme itu?

Tarik menariknya jelas, antara Amerika di satu pihak dan Uni Eropa di sisi lain. Karena memang Amerika di bawah Obama, dengan Partai Demokrat, lebih proteksionis. Obama sudah mencanangkan akan me-*review* lagi perundingan AFTA, beberapa perdagangan bilateral dengan

Eropa. Ini masih belum berhasil. Padahal ada banyak harapan (terhadap Forum Davos, red.) seperti perbaikan terhadap sistem finansial global. Jadi, ada upaya untuk memperluas atau membangun IMF dan *World Bank* baru. Tapi kenyataannya saya melihat tidak ada hasil yang signifikan. Jadi, tidak ada kesepakatan komitmen untuk ke arah sana.

Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah proteksionisme negara tersebut?

Yang pasti adalah menciptakan atau memperkuat satu lembaga seperti IMF yang lebih kuat dan lebih berkeadilan. Selama ini kan posisi IMF sangat didominasi oleh negara-negara maju. Padahal kalau kita lihat, ada kebutuhan mendesak untuk perubahan sistem finansial dunia.

Soal wacana pembentukan Dewan Ekonomi di PBB?

Ya, ada wacana seperti itu. Tapi wacana itu belum bersambut gayung. Maksudnya masih sekedar wacana yang diajukan negara Jerman tapi belum ditanggapi AS.

Seberapa besar pengaruh proteksi dunia terhadap peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat dalam negeri?

Sekarang nilai ekspor kita rasionya terhadap PDB mencapai 30 persen. Kasarnya 30 persen penduduk Indonesia tergantung pada perdagangan. Ini belum yang bergerak dalam bidang impor. Kalau misalnya ekspor kita tertekan berapa banyak masyarakat kita yang terpengaruh. Minimal profitabilitas dunia usaha kita berkurang.

Pemerintah telah mengeluarkan stimulus untuk meningkatkan proyek infrastruktur dan meningkatkan daya beli masyarakat. Apa komentar Anda?

Konsumsi di dalam negeri bisa ditingkatkan kalau ada daya beli. Peningkatan daya beli itu kan dari ekspor. Kalau ekspor ditutup, maka peningkatan daya beli sebagian penduduk juga tidak ada. Sebenarnya ada keterkaitan antara ekspor dan daya beli masyarakat. Kalau misalnya masing-masing negara sudah menutup diri dan mengandalkan semata-mata pada kekuatan fundamental yang ada di dalam negerinya, maka tidak tercapai juga, termasuk Indonesia.

Pemerintah selama ini banyak melakukan stimulus. Masalahnya yang kita butuhkan adalah stimulus yang segera untuk saat ini. Paling cepat fiskal 2009 itu kan terjadi pada pertengahan tahun ini, Juli-Agustus. Jadi, jangan-jangan, dampak stimulus paling cepat terjadi pada awal tahun 2010. Yang penting sekarang adalah lebih dari sisi moneterinya.

Yaitu bagaimana pertumbuhan tingkat kredit, menjaga optimisme dunia usaha. Maksudnya agar mereka mencari pasar baru, atau melakukan diversifikasi penjualan supaya tidak tersendat dan malah menyebabkan dampak krisis global. (Jurnal Nasional)

V. EDITORIAL

:

1. Pengerah TKI Bersaing dengan Pihak Asing

PARA pengerah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang selama ini dikelola penuh oleh pengusaha domestik bakal mendapat pesaing serius dari pihak asing.

Setuju atau tidak setuju, persaingan itu tidak dapat ditolak. Pihak asing dimungkinkan ikut berkiprah di lahan empuk itu setelah adanya revisi aturan penanaman modal asing (PMA) untuk bisnis pemberangkatan TKI ke luar negeri.

Mimpi pihak asing mengeruk keuntungan dari urusan TKI segera menjadi kenyataan menyusul kesepakatan antardepartemen mengenai pembahasan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 111 Tahun 2008 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Syarat atau yang lebih akrab di telinga dengan istilah Daftar Negatif Investasi (DNI).

Revisi aturan tersebut merekomendasikan PMA yang selama ini diharamkan menyentuh bidang usaha pengiriman TKI ke luar negeri kini bebas dengan syarat kepemilikan modal tak lebih dari 49%. Kebijakan pemberian kesempatan ke pihak asing untuk menggarap pengerahan TKI sudah pasti akan menjadi pukulan telak bagi pengusaha domestik yang selama ini menguasai 100% sektor usaha ini.

Sudah menjadi rahasia umum, penanganan TKI oleh sebagian besar pengusaha domestik cenderung tak memanusiasikan para pencari devisa itu. Jadi, kehadiran pihak asing diharapkan bisa melahirkan persaingan yang sehat sehingga para pengerah TKI yang asal-asalan bisa berbenah diri.

Lagipula seharusnya pengusaha lokal tak perlu takut bersaing dengan pihak asing, toh selama ini sudah berpengalaman menggarap bisnis jasa ini. Ketertarikan pihak asing berbisnis di

sektor pengerahan TKI ke luar negeri cukup beralasan. Tengok saja, permintaan terhadap tenaga perawat dan pengasuh orang jompo (tenaga terampil terdidik) dari berbagai negara maju cukup menggiurkan.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) kewalahan memenuhi permintaan tenaga terampil terdidik tersebut. Tahun lalu, sebanyak 740.000 TKI dialokasikan di luar negeri. Dari jumlah itu sebanyak 36% tercatat sebagai tenaga terampil terdidik.

Tahun ini BNP2TKI menaikkan kuota pengiriman tenaga terampil hingga di atas 40% dari pengiriman TKI secara keseluruhan. Berdasarkan data BNP2TKI, permintaan tenaga terampil terdidik oleh pihak Jepang tak kurang dari 1.000 orang tahun lalu, tetapi yang baru bisa dipenuhi sekitar 200 orang.

Yang menggembirakan, pihak Jepang bersedia memberikan gaji yang setara dengan gaji perawat di sana sekitar Rp20 juta per bulan. Permintaan tenaga terampil terdidik yang cukup besar juga datang dari Kuwait. Negara Timur Tengah itu meminta Indonesia menyiapkan sekitar 12.000 tenaga perawat.

Permintaan serupa juga dilontarkan pihak Qatar. Menteri Kesehatan Qatar Sheikha Ghalia bahkan bersiap menerima tenaga dokter dari Indonesia. Peluang lain di depan mata adalah memenuhi kebutuhan tenaga terampil terdidik untuk Amerika Serikat (AS) dan Kanada. Kedua negara tersebut seperti diinformasikan BNP2TKI, hingga 2020, membutuhkan sekitar 1 juta orang.

Informasi itu masuk di akal karena usia rata-rata warga AS dan Kanada belakangan ini cukup panjang sehingga membutuhkan perawatan tersendiri. Tentu ini peluang yang tak boleh disia-siakan. Di balik peluang itu ternyata terselip tantangan yang tak ringan, yakni bagaimana menyiapkan calon tenaga kerja yang punya kompetensi di bidangnya dan penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris.

Di pasar tenaga pencari devisa, pesaing terdekat kita adalah Filipina. Dalam soal ketekunan dan kesopanan TKI boleh diadu dengan pekerja migran dari negara lain, tapi itu tidak cukup untuk hidup di luar negeri. Sebenarnya yang menarik bukan persoalan kiprah pihak asing dalam bisnis TKI, tetapi kisruh antara BNP2TKI dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sangat disayangkan, kedua lembaga negara yang ditugasi menangani urusan tenaga kerja justru saling gontok-gontokan yang bisa berdampak buruk terhadap nasib TKI. Pasalnya, pihak BNP2TKI merasa direduksi kewenangannya dalam urusan TKI lewat Peraturan Menakretrans No 22 Tahun 2008.

Padahal, BNP2TKI adalah sebuah lembaga pemerintah nondepartemen sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Sungguh ironis nasib TKI tergadai gara-gara ego lembaga. (Koran Sindo)

2. Antara Forum Belem dan Davos

Pekan lalu, selama lima hari, berlangsung pertemuan tahunan yang dihadiri para pemimpin, baik politik maupun bisnis, di Davos, Swiss.

Sementara di Belem, Brasil, akhir Januari lalu juga berlangsung Forum Sosial Dunia yang dimaksudkan sebagai tandingan Forum Davos. Kalau Davos lebih bernuansa elite pemerintahan dan korporasi, Belem merupakan pertemuan kelompok kiri.

Pertemuan Davos yang berakhir Minggu (1/2) dikabarkan tidak berhasil menelurkan terobosan untuk menanggulangi krisis yang kini tengah melanda dunia. Semua mengakui bahwa kedalaman krisis sejauh ini belum diketahui, dan solusi pun sulit diperoleh.

Mengomentari situasi ini, salah seorang tokoh pemikiran Asia, Kishore Mahbubani, mengatakan, semua orang kehilangan (arah) di Davos. Paling jauh yang bisa ia katakan adalah kita perlu pengkajian ulang secara fundamental atas seluruh sistem global untuk melihat apa yang salah. Sayangnya, tidak seorang pun di Davos yang tampaknya siap untuk mengajukan pertanyaan fundamental seperti itu.

Sementara itu, di Belem, peserta juga membicarakan berbagai problem, seperti tenaga kerja, hak asasi manusia, lingkungan, pendidikan, hak suku terasing, dan agama. Para pemimpin

sayap kiri yang hadir di forum ini mendesak para tokoh yang berkumpul di Davos untuk segera memperbaiki krisis.

Seperti dinyatakan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, negara-negara maju harus segera melakukan langkah spesifik untuk menangani krisis sehingga negara miskin dapat berkembang lagi.

Sama seperti di Davos, di Belem pun muncul harapan agar Forum bisa membahas krisis dan menghasilkan solusi konkret, tetapi ternyata yang juga muncul adalah kebingungan. Mungkin untuk menghibur diri, salah seorang anggota panitia Forum Belem mengatakan, kegiatan tersebut sukses karena merupakan satu koalisi besar dalam melawan krisis.

Dari satu sisi, Forum Belem betul bahwa krisis seharusnya dilawan dengan koalisi besar. Bahkan akan lebih jitu lagi kalau koalisi yang dimaksud juga melibatkan semua pihak yang berperan menentukan dalam urusan ekonomi dan keuangan.

Sebaliknya, kalau yang terjadi adalah saling menyalahkan, dan pihak-pihak yang berkepentingan tidak menjalin kerja sama, energi yang terkumpul pun kurang besar untuk menanggulangi krisis.

Kita memang diingatkan, pengelompokan G-20 yang menghimpun bangsa-bangsa paling kaya pun belum tentu bisa menanggulangi krisis. Daripada saling menyalahkan, sebaiknya semua pihak justru berkontribusi untuk mengatasi krisis. (Kompas)

3. Gangguan Perbatasan Terulang Lagi

Kawasan perbatasan Indonesia harus menjadi perhatian serius pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini perlu senantiasa diingatkan karena wilayah Indonesia demikian luas sehingga rawan terhadap berbagai gangguan dan pelanggaran, baik di darat, laut, maupun udara.

Gangguan wilayah perbatasan terjadi lagi di Kalimantan Barat beberapa hari lalu. Komandan Korem Alambhana Wanawwai Kolonel Nukman Kasodi mengungkapkan, sebanyak 50 buah patok perbatasan hilang karena ulah pengusaha kelapa sawit Malaysia. Para pengusaha membangun jalan di tapal batas di Kalimantan Barat, yang tersebar di lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Antara lain di Kabupaten Kapuas Hulu, Sanggau, Bengkayang, dan Sambas.

Pelanggaran wilayah darat oleh Malaysia itu bukan baru pertama kali terjadi, dan mungkin bukan yang terakhir. Mereka tidak hanya memindah patok batas, tapi juga mengambil kayu dari hutan Indonesia.

Kerawanan juga ada di wilayah udara. Beberapa waktu lalu, sebuah helikopter Australia nyelonong ke wilayah Indonesia dan mendarat di Papua secara ilegal. Pelanggaran oleh pesawat tempur asing pun pernah terjadi beberapa kali.

Kawasan perairan yang merupakan sebagian besar wilayah Indonesia lebih rawan lagi. Pelanggaran wilayah laut Indonesia oleh kapal-kapal nelayan asing sudah menjadi hal biasa. Belum selesai satu kasus ditangani, sudah muncul kasus pelanggaran lain. Akibatnya, Indonesia menderita kerugian triliunan rupiah setiap tahun gara-gara pencurian ikan oleh kapal-kapal asing.

Karena itu, pemerintah bersama aparat pertahanan dan keamanan harus terus meningkatkan penjagaan wilayah Indonesia, baik darat, laut, maupun udara. Keamanan wilayah perbatasan merupakan masalah penting karena hal ini menyangkut kedaulatan dan kewibawaan negara kita.

Selain menindak tegas para pelaku pelanggaran dan gangguan wilayah, pemerintah mesti meningkatkan upaya-upaya preventif agar gangguan dan pelanggaran itu tidak terjadi kembali.

Untuk itu, peningkatan kekuatan TNI menjadi keniscayaan, baik Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kekuatan armada Angkatan Laut dan Angkatan Udara kita belum memadai dibandingkan dengan luas wilayah yang harus mereka jaga.

Aparat Kepolisian, Imigrasi, dan Bea Cukai pun harus terus meningkatkan kemampuannya untuk menjaga wilayah perbatasan. Kriminalitas antarnegara seperti penyelundupan, perdagangan manusia atau *human trafficking*, dan perdagangan narkoba kini semakin canggih dengan berbagai modus operandi serta melibatkan sindikat internasional. Para

pelaku tidak hanya menggunakan pintu-pintu masuk resmi seperti bandar udara, pelabuhan, dan jalur lintas batas, tapi juga jalur-jalur ilegal yang tersebar di berbagai lokasi di Tanah Air.

Selain pendekatan pertahanan keamanan, penjagaan perbatasan juga mesti menggunakan pendekatan kesejahteraan, yakni dengan membangun kawasan-kawasan terluar itu. Sudah selayaknya wilayah perbatasan diperlakukan sebagai “serambi depan” Indonesia yang harus dijaga dan dirawat sebaik-baiknya.

Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah mesti memperhatikan ketersediaan infrastruktur, sarana, dan prasarana yang diperlukan oleh masyarakat di wilayah perbatasan. Pembangunan jalan raya, penyediaan listrik, pengembangan perumahan dan industri di wilayah perbatasan sama pentingnya dengan di wilayah perkotaan. Bila infrastrukturnya cukup memadai, maka pengelolaan potensi wilayah perbatasan seperti hasil laut dan hasil hutan pun bisa dilakukan dengan optimal.

Kalau kondisi sosial ekonomi masyarakat perbatasan baik, mereka akan mendukung penjagaan wilayah terluar negeri kita. Sebab, ketahanan sosial ekonomi merupakan pilar dari ketahanan nasional juga. (Jurnal Nasional)

Jakarta, 3 Februari 2009
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media
Deplu